

**PANITIA REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**P E N G U M U M A N**

NOMOR KP.01/01/REK-CASN/PENG/08/2024

TENTANG  
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Perdagangan membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang berminat dan memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Perdagangan.

**A. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JUMLAH KEBUTUHAN, LOKASI KEBUTUHAN, DESKRIPSI TUGAS DAN RENTANG PENGHASILAN**

Jumlah kebutuhan PNS berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran I.

Informasi terkait tugas jabatan dan rentang penghasilan alokasi kebutuhan PNS Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang masing-masing Jabatan Fungsional dan penghasilan PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III.

**B. KRITERIA PELAMAR**

1. Kebutuhan Umum

Merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.

2. Kebutuhan Khusus

- a. Penyandang Disabilitas; dan
- b. Putra/Putri Kalimantan.

**C. PERSYARATAN UMUM**

Persyaratan umum yang harus dipenuhi pelamar yaitu:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, serta memiliki Integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia pelamar paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat menyelesaikan pendaftaran *online* di laman <https://sscasn.bkn.go.id> berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang

- digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai;
  5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  8. Pelamar penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya, selain itu pelamar juga wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
  9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) dari skala 4,00 (empat koma nol) bagi lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri dan 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol) bagi lulusan dari Perguruan Tinggi Swasta;
  10. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi "Unggul" atau serendah-rendahnya "A" pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
  11. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
  12. Pelamar yang saat ini berstatus Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau setingkat Pimpinan Kementerian/Lembaga/Gubernur/Walikota/Bupati atau Pejabat yang Berwenang (PyB);
  13. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

#### D. PERSYARATAN KHUSUS

Berikut adalah persyaratan khusus bagi pelamar CPNS TA 2024:

1. Jabatan Ahli Pertama - Negosiator Perdagangan **wajib** memiliki Sertifikat TOEFL ITP minimal skor 550 atau Sertifikat IELTS minimal skor 6,5 atau Sertifikat iBT minimal skor 80 berlaku 2 (dua) tahun sejak sertifikat dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Inggris;
2. Jabatan Ahli Pertama – Pranata Laboratorium Kemetreologian **wajib** melampirkan Surat keterangan tidak buta warna dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah;
3. Jabatan Tenaga Kesehatan **wajib** melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai Jabatan yang dilamar.

## E. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR CPNS

Berikut adalah tata cara pendaftaran pelamar CPNS:

1. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id> terdiri dari:
  - a. Pas Foto terbaru dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Memakai pakaian formal kemeja putih polos dan tidak memakai jas/blazer/rompi/dasi;
    - 2) Bagi pelamar yang berhijab menggunakan hijab berwarna hitam polos;
    - 3) Latar belakang Pas Foto berwarna merah;
    - 4) Pas Foto menggunakan format JPEG/JPG dengan ukuran *file* maksimal 200 KB;
    - 5) Posisi wajah dan badan menghadap ke kamera/depan sesuai dengan contoh terlampir (lampiran IV);
  - b. Surat Lamaran diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Perdagangan di Jakarta, dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan tinta hitam sesuai format terlampir (lampiran V);
  - c. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar diketik menggunakan komputer, dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan tinta hitam sesuai format terlampir (lampiran VI);
  - d. Pembelian e-meterai sesuai dengan ketentuan pada bagian E. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR CPNS poin (b) dan (c) harus melalui portal resmi PERURI. Tata cara pembubuhan e-meterai pada dokumen dapat diakses pada tautan <https://youtu.be/BilEWpV6Ets?si=4mxoAN3zyTf87Bf8> atau melalui kanal Youtube BKNgoidofficial;
  - e. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
  - f. *Scan* Ijazah dan Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar;
  - g. Apabila dalam Ijazah atau Transkrip Nilai tidak tercantum keterangan akreditasi, maka wajib melampirkan *scan* surat akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada tahun kelulusan atau tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dapat diakses pada <https://www.banpt.or.id/bianglala/bianglala>;
  - h. *Scan* Ijazah serta Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli serta Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi bagi Pelamar yang merupakan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
  - i. Bagi pelamar untuk Jabatan Negosiator Perdagangan wajib memiliki Sertifikat TOEFL ITP minimal skor 550 atau Sertifikat IELTS minimal skor 6,5 atau Sertifikat iBT minimal skor 80 berlaku 2 (dua) tahun sejak sertifikat dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Inggris;
  - j. Bagi pelamar yang melamar pada formasi khusus disabilitas, wajib mengunggah:
    - 1) *Scan* asli surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    - 2) Mengunggah video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar pada laman <https://sscASN.bkn.go.id> pada saat pendaftaran.

- k. Pelamar yang mendaftar pada formasi khusus Putra/Putri Kalimantan wajib mengunggah *scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menunjukkan domisili di salah satu Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN. Pelamar yang memenuhi persyaratan ini akan diprioritaskan untuk ditempatkan di Ibu Kota Nusantara;
  - l. Bagi pelamar yang berstatus Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), wajib mengunggah *scan* surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau setingkat Pimpinan Kementerian/Lembaga/Gubernur/Walikota/Bupati atau Pejabat yang Berwenang (PyB);
  - m. Pelamar yang mendaftar pada jabatan Negosiator Perdagangan Ahli Pertama, wajib mengunggah *scan* Sertifikat TOEFL ITP atau IELTS atau iBT yang berlaku 2 (dua) tahun sejak sertifikat dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Inggris;
  - n. Pelamar yang mendaftar pada jabatan Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Pertama, wajib mengunggah *scan* Surat Keterangan Dokter yang menyatakan tidak buta warna dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah;
  - o. Pelamar yang mendaftar pada jabatan Tenaga Kesehatan, wajib mengunggah *scan* Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai Jabatan yang dilamar;
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK).

## F. TAHAPAN DAN MEKANISME SELEKSI

Tahapan Seleksi CPNS meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 40% yang meliputi ujian:
  - a. Seleksi Kompetensi Dasar meliputi:
    - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
    - 2) Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
    - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

### Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar

Kategori Pelamar	TWK	TIU	TKP	Nilai Kumulatif
Umum	65	80	166	Maks. 550
Putra/Putri Kalimantan	65	80	166	Maks. 550
Disabilitas	-	60	-	Min. 286

- b. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024.
3. Seleksi Kompetensi Bidang yang meliputi ujian:

No	Seleksi Kompetensi Bidang	Bobot Penilaian
1	<i>Computer Assisted Test</i> (CAT)	50% (tidak menggugurkan)
2	Psikotes	40% (tidak menggugurkan)
3	Wawancara	10% (tidak menggugurkan)

4. Lokasi seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang akan diumumkan lebih lanjut pada *website* <https://rekrutmen.kemendag.go.id/cpns>

#### G. JADWAL SELEKSI PENGADAAN CPNS

Jadwal seleksi Pengadaan CPNS adalah sebagai berikut:

##### Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025

No	Kegiatan	Jadwal
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

*Catatan: jadwal dapat berubah sewaktu-waktu yang akan diberitahukan melalui website <https://rekrutmen.kemendag.go.id/cpns> dan Portal Nasional <https://sscasn.bkn.go.id/>.*

#### H. SISTEM KELULUSAN CPNS

1. Hasil kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Adapun kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh Panitia Rekrutmen CPNS Kementerian Perdagangan pada laman <https://rekrutmen.kemendag.go.id/cpns>;
2. Peserta yang telah lulus seleksi administrasi pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024, dapat memilih untuk mengikuti SKD atau menggunakan nilai pada Sertifikat SKD CAT BKN Tahun Anggaran 2023 pada SSCASN. Kebijakan tentang pemanfaatan sertifikat SKD CAT BKN PNS merujuk pada Keputusan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 234.1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Sertifikat SKD CAT BKN PNS;
3. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib melakukan pencetakan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan kertas HVS ukuran A4;
4. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat melakukan sanggah hasil Seleksi Administrasi;
5. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar didasarkan pada nilai ambang batas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024;
6. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang adalah pelamar yang lulus nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan;
7. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

#### I. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar wajib menggunakan e-meterai pada surat lamaran dan surat pernyataan. Tata cara pembelian dan pembubuhan e-meterai dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>. E- meterai yang sudah digunakan untuk 1 (satu) dokumen,

- tidak digunakan untuk dokumen lainnya;
2. Pendaftaran di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
  3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
  4. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi CPNS tidak dipungut biaya;
  5. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri, dihimbau agar pelamar tidak mempercayai apabila ada oknum/pihak – pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
  6. Kementerian Perdagangan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Perdagangan atau Panitia Rekrutmen CASN;
  7. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
  8. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka panitia Rekrutmen CASN Kementerian Perdagangan dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
  9. Pelamar yang terbukti memberi keterangan yang tidak sesuai/tidak benar/memanipulasi/memalsukan data, akan dinyatakan gugur;
  10. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pendaftar/peserta menjadi milik panitia;
  11. Setiap informasi/perubahan informasi terkait pelaksanaan pengadaan CPNS Kementerian Perdagangan Tahun 2024 akan diumumkan secara resmi melalui laman Kementerian Perdagangan <https://rekrutmen.kemendag.go.id/cpns> dan Portal Nasional <https://sscasn.bkn.go.id>;
  12. Pengaduan, pelayanan, dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan CPNS Kementerian Perdagangan Tahun 2024 dapat menghubungi:
    - a. *Whatsapp* 081586249080 (tidak menerima SMS dan telepon, hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat, pukul 08.00 - 16.00 WIB).
    - b. *X/Twitter* @casnkemendag
  13. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi.

Jakarta, 19 Agustus 2024  
Sekretaris Jenderal,

selaku  
Ketua Panitia Rekrutmen CPNS  
Kementerian Perdagangan TA 2024



**LAMPIRAN I**

Nomor : KP.01/01/REK-CASN/PENG/08/2024  
Tanggal : 19 Agustus 2024

**Jumlah Kebutuhan CPNS Kementerian Perdagangan  
TA 2024**

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	UMUM	1	BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN
2	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	UMUM	1	BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN
3	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	1	BIRO HUKUM
4	ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 MANAJEMEN / D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	UMUM	7	BIRO ADVOKASI PERDAGANGAN

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
5	ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	UMUM	15	DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN
6	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 PERDAGANGAN INTERNASIONAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	6	PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA EKSPOR DAN JASA PERDAGANGAN
7	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM	UMUM	2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 PERDAGANGAN INTERNASIONAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	PUSAT PENANGANAN ISU STRATEGIS
9	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 PERDAGANGAN INTERNASIONAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	2	PUSAT EKSPOR IMPOR DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
10	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	1	DIREKTORAT PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN PERDAGANGAN JASA
11	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM	UMUM	2	DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR
12	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 PERDAGANGAN INTERNASIONAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
13	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	DIREKTORAT BINA USAHA PERDAGANGAN
14	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 PERDAGANGAN INTERNASIONAL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	2	BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG DAN PASAR LELANG KOMODITAS
15	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM	DISABILITAS	1	DIREKTORAT EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN
16	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
17	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL	UMUM	1	DIREKTORAT SARANA PERDAGANGAN DAN LOGISTIK
18	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	UMUM	2	AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI
19	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK	UMUM	1	DIREKTORAT BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
20	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	BIRO PERENCANAAN
21	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR
22	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR PRODUK MANUFAKTUR
23	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL I

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
24	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI	UMUM	1	SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
25	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
26	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR PRODUK PRIMER
27	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK	UMUM	1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI EKSPOR
28	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI	UMUM	1	BALAI PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN MAKASSAR
29	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR JASA DAN PRODUK KREATIF
30	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
31	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	DIREKTORAT EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN
32	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA
33	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA
34	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	BALAI PELATIHAN APARATUR METROLOGI DAN MUTU
35	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK	UMUM	1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
36	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	UMUM	4	BIRO KEUANGAN
37	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	BALAI PENGELOLAAN STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
38	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	BALAI PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN PADANG
39	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
40	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	DISABILITAS	1	DIREKTORAT BINA USAHA PERDAGANGAN

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
41	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	UMUM	8	PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
42	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	UMUM	5	DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
43	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	UMUM	4	DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR PRODUK MANUFAKTUR
44	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	UMUM	6	DIREKTORAT EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
45	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	1	DIREKTORAT PERUNDINGAN ASEAN
46	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	UMUM	3	DIREKTORAT PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN PERDAGANGAN JASA

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
47	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	UMUM	7	DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL
48	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	UMUM	1	BIRO ADVOKASI PERDAGANGAN

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
49	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	1	DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN
50	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	1	DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
51	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	UMUM	2	DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA
52	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	UMUM	2	PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN DOMESTIK

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
53	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	UMUM	6	DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR JASA DAN PRODUK KREATIF
54	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	UMUM	4	PUSAT EKSPOR IMPOR DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
55	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	UMUM	7	DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR PRODUK PRIMER
56	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	UMUM	3	DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
57	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	3	BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
58	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	1	PUSAT PENANGANAN ISU STRATEGIS
59	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	1	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
60	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III PERPUSTAKAAN	UMUM	1	AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI
61	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI	UMUM	6	BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
62	ASISTEN STATISTISI TERAMPIL	D-III STATISTIKA BISNIS / D-III STATISTIKA TERAPAN	UMUM	1	DIREKTORAT BINA USAHA PERDAGANGAN
63	ASISTEN STATISTISI TERAMPIL	D-III STATISTIKA BISNIS / D-III STATISTIKA TERAPAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	1	DIREKTORAT PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
64	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PAJAK / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV AKUNTANSI / D-IV MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK SIPIL	UMUM	2	INSPEKTORAT I
65	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PAJAK / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV AKUNTANSI / D-IV MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK SIPIL	UMUM	2	INSPEKTORAT IV
66	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PAJAK / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV AKUNTANSI / D-IV MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK SIPIL	UMUM	3	INSPEKTORAT III
67	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PAJAK / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV AKUNTANSI / D-IV MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK SIPIL	UMUM	3	INSPEKTORAT II
68	DOSEN ASISTEN AHLI	S-2 FISIKA / S-2 TEKNIK FISIKA / S-2 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN KONTROL	UMUM	9	AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
69	NEGOSIATOR PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / D-IV BAHASA MANDARIN UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / D-IV BAHASA PERANCIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / D-IV MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 BAHASA ARAB / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BAHASA MANDARIN / S-1 BAHASA PERANCIS / S-1 BAHASA RUSIA / S-1 BISNIS / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 SAINS KOMUNIKASI / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SAINS POLITIK / S-1 SASTRA ARAB / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SASTRA PERANCIS / S-1 SASTRA RUSIA / S-1 HUKUM	UMUM	8	DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL
70	PEMERIKSA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	UMUM	3	BIRO PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, SISTEM RESI GUDANG, DAN PASAR LELANG KOMODITAS
71	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK	UMUM	2	BIRO HUKUM

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
72	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM / D-IV HUKUM	UMUM	4	BIRO ADVOKASI PERDAGANGAN
73	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET	UMUM	1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
74	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET	UMUM	2	BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN
75	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI / D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET	UMUM	2	BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN
76	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III BAHASA ARAB / D-III BAHASA BELANDA / D-III BAHASA INGGRIS / D-III BAHASA JEPANG / D-III BAHASA JERMAN / D-III BAHASA KOREA / D-III BAHASA MANDARIN / D-III BAHASA PERANCIS / D-III GIZI / D-III KOMUNIKASI MASSA / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN TATA BOGA / D-III PARIWISATA / D-III PERHOTELAN / D-III PERJALANAN WISATA / D-III TATA BOGA / D-III TATA HIDANG	UMUM	2	BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN
77	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	D-IV PRODUKSI MEDIA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 ILMU INFORMATIKA	UMUM	1	BALAI PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN MAKASSAR
78	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	D-IV PRODUKSI MEDIA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	UMUM	1	AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI
79	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA / D-IV PRODUKSI MEDIA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	UMUM	1	BALAI PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN PADANG

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
80	PENJAMIN MUTU PRODUK AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 FISIKA / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PETERNAKAN / S-1 SAINS PERIKANAN / S-1 SAINS PERTANIAN / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LOGISTIK / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	UMUM	6	DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU
81	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
82	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
83	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	2	BIRO HUKUM
84	PERANCANG PERATURAN	S-1 HUKUM	DISABILITAS	1	BIRO PERATURAN PERUNDANG-

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
	PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA				UNDANGAN DAN PENINDAKAN
85	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
86	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	BIRO HUKUM
87	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN BISNIS / S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK	UMUM	1	BIRO PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, SISTEM RESI GUDANG, DAN PASAR LELANG KOMODITAS
88	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	1	BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA BEKASI
89	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING	UMUM	2	BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
90	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN BISNIS / S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	1	SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
91	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI	UMUM	1	BALAI PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN MAKASSAR

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
92	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN BISNIS / S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK	UMUM	1	BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN
93	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN BISNIS / S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
94	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI BISNIS	UMUM	1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR PRODUK PRIMER
95	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI BISNIS	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
96	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 JURNALISTIK / S-1 PERIKLANAN / D-IV DESAIN GRAFIS / D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-IV DESAIN MEDIA / D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI BERITA / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS / S-1 SASTRA INDONESIA / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-IV KOMUNIKASI MASSA	UMUM	2	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
97	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	DIREKTORAT TERTIB NIAGA
98	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	2	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
99	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III ADMINISTRASI BISNIS	UMUM	1	BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL I
100	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	1	BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MEDAN
101	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	3	BIRO PERENCANAAN
102	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	1	BIRO PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, SISTEM RESI GUDANG, DAN PASAR LELANG KOMODITAS
103	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI BISNIS	UMUM	1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR PRODUK MANUFAKTUR
104	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	1	AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI
105	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
106	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	1	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
107	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	1	BALAI PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN MAKASSAR
108	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN PAJAK	UMUM	1	BALAI PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN YOGYAKARTA
109	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN	UMUM	2	DIREKTORAT EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN
110	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR PRODUK PRIMER
111	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	3	BIRO HUKUM
112	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	1	DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN
113	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	2	BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN
114	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	1	DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA
115	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	1	DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
116	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	1	DIREKTORAT IMPOR
117	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	1	SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
118	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	1	BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MAKASSAR
119	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN	UMUM	1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI EKSPOR
120	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	2	DIREKTORAT EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN
121	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	1	BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN
122	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA
123	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR JASA DAN PRODUK KREATIF
124	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
					PERDAGANGAN LUAR NEGERI
125	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	2	PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI
126	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
127	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN
128	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
129	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	DIREKTORAT PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN PERDAGANGAN JASA
130	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	2	BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
131	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN	UMUM	1	DIREKTORAT STANDARDISASI

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
		PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI			DAN PENGENDALIAN MUTU
132	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN	UMUM	2	SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
133	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	UMUM	1	BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL III
134	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	3	BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
135	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI EKSPOR
136	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
137	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK / S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	2	PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI
138	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI	UMUM	2	AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI
139	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	DIREKTORAT BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
140	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	DISABILITAS	1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
141	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	BIRO HUKUM
142	PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN AHLI PERTAMA	S-1 FISIKA / S-1 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI / S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK INDUSTRI	UMUM	2	BALAI PENGELOLAAN STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL
143	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERSONALIA	DISABILITAS	1	BALAI PENGUJIAN ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN
144	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERSONALIA	UMUM	1	BALAI PENGELOLAAN STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
145	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN PERSONALIA / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	UMUM	1	BALAI PELATIHAN APARATUR METROLOGI DAN MUTU
146	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERSONALIA	UMUM	1	BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA
147	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN PERSONALIA / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	UMUM	1	BALAI PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN YOGYAKARTA
148	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERSONALIA	UMUM	1	BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MAKASSAR
149	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERSONALIA	UMUM	1	BALAI PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN MAKASSAR
150	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERSONALIA	UMUM	1	BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MEDAN
151	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERSONALIA	UMUM	1	DIREKTORAT PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN PERDAGANGAN JASA
152	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERSONALIA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	1	DIREKTORAT TERTIB NIAGA

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
153	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN PERSONALIA / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	2	BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
154	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERSONALIA	UMUM	1	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN
155	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERSONALIA	UMUM	1	BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA BEKASI
156	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERSONALIA	UMUM	1	DIREKTORAT PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
157	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERSONALIA	UMUM	1	BALAI PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN PADANG
158	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	UMUM	2	AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI
159	STATISTISI AHLI PERTAMA	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 MATEMATIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 SAINS DATA SPASIAL / S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA TERAPAN	UMUM	2	PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
160	STATISTISI AHLI PERTAMA	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 MATEMATIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 SAINS DATA SPASIAL / S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA TERAPAN	DISABILITAS	1	PUSAT EKSPOR IMPOR DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
161	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 SAINS DATA / S-1 SAINS DATA SPASIAL / S-1 STATISTIKA TERAPAN	UMUM	3	PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
162	STATISTISI AHLI PERTAMA	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 MATEMATIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 SAINS DATA SPASIAL / S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA TERAPAN	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	1	BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
163	STATISTISI AHLI PERTAMA	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 SAINS DATA / S-1 SAINS DATA SPASIAL / S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA TERAPAN / S-1 MATEMATIKA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN	1	PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN DOMESTIK
164	WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	S-2 ADMINISTRASI PUBLIK / S-2 EKONOMI / S-2 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-2 HUKUM / S-2 ILMU MANAJEMEN / S-2 ILMU POLITIK	UMUM	1	BALAI PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN MAKASSAR
165	WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	S-2 EKONOMI / S-2 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-2 HUKUM / S-2 ILMU MANAJEMEN / S-2 ILMU POLITIK / S-2 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	BALAI PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN PADANG

**LAMPIRAN II**

Nomor : KP.01/01/REK-CASN/PENG/08/2024

Tanggal : 19 Agustus 2024

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan PNS Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang masing-masing Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

**Deskripsi Tugas Jabatan**

No	Jabatan	Tugas Jabatan
1.	Ahli Pertama - Analis Hukum	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundangundangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundangundangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundangundangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum
2.	Ahli Pertama - Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan	Melaksanakan analisis di bidang penyelidikan dan pemelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan
3.	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan
4.	Ahli Pertama – Analis Pengelolaan Keuangan APBN	Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi
5.	Ahli Pertama - Analis Perdagangan	Melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan nonperizinan Perdagangan, Pengelolaan Ekspor dan Impor, Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen, Pengembangan promosi perdagangan, Pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen
6.	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks

No	Jabatan	Tugas Jabatan
		kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7.	Ahli Pertama – Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur
8.	Asisten Ahli – Dosen	Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi
9.	Ahli Pertama - Auditor	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan
10.	Ahli Pertama - Negosiator Perdagangan	Melaksanakan negosiasi melalui kerja sama dan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional
11.	Ahli Pertama - Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi	Melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan di bidang PBK dan SRG dan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan, serta fasilitasi substansi di bidang PBK, SRG, dan PLK.
12.	Ahli Pertama – Pengembang Teknologi Pembelajaran	Melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran
13.	Ahli Pertama – Penjamin Mutu Produk	Melakukan penjaminan mutu produk melalui pengembangan standar mutu produk, penilaian sumber daya manusia dan kelembagaan terkait mutu, penerapan dan pemantauan kebijakan standar mutu produk, serta pembinaan penerapan standar terkait mutu.
14.	Ahli Pertama - Perancang Peraturan Perundang-undangan	Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya
15.	Ahli Pertama - Perencana	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada Instansi Pemerintahan secara terstruktur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

No	Jabatan	Tugas Jabatan
16.	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan
17.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia
18.	Ahli Pertama – Pranata Laboratorium Kemetrolgian	Melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal
19.	Ahli Pertama - Pustakwan	Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan
20.	Ahli Pertama - Statistisi	Melakukan kegiatan statistik
21.	Ahli Pertama - Widyaiswara	Melaksanakan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah
22.	Terampil - Arsiparis	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi
23.	Terampil – Asisten Statistisi	Melakukan kegiatan statistik
24.	Terampil – Penata Laksana Barang	Melaksanakan kegiatan pengelolaan BMN/D
25.	Terampil – Pranata Keuangan APBN	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN, meliputi: a. Perikatan dan penyelesaian tagihan b. Pelaksanan perintah pembayaran c. Kebendaharaan d. Pengelolaan administrasi belanja pegawai e. Penyiapan analisis laporan keuangan instansi
26.	Terampil - Pranata Komputer	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia
27.	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas Jabatan</b>
28.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	Melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang-undangan
29.	Pengelola Keprotokolan	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah

**LAMPIRAN III**

Nomor : KP.01/01/REK-CASN/PENG/08/2024

Tanggal : 19 Agustus 2024

Informasi terkait rentang penghasilan per jabatan PNS Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

No	Jabatan	Penghasilan Minimal	Penghasilan Maksimal
1.	Ahli Pertama - Analis Hukum	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
2.	Ahli Pertama - Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
3.	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
4.	Ahli Pertama – Analis Pengelolaan Keuangan APBN	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
5.	Ahli Pertama - Analis Perdagangan	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
6.	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
7.	Ahli Pertama – Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
8.	Asisten Ahli – Dosen	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
9.	Ahli Pertama - Auditor	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
10.	Ahli Pertama - Negosiator Perdagangan	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
11.	Ahli Pertama - Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
12.	Ahli Pertama – Pengembang Teknologi Pembelajaran	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
13.	Ahli Pertama – Penjamin Mutu Produk	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
14.	Ahli Pertama - Perancang Peraturan Perundang-undangan	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
15.	Ahli Pertama - Perencana	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
16.	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
17.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
18.	Ahli Pertama – Pranata Laboratorium Kemetrolgian	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
19.	Ahli Pertama - Pustakwan	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
20.	Ahli Pertama - Statistisi	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
21.	Ahli Pertama - Widyaiswara	Rp 7.880.850	Rp 8.380.850
22.	Terampil - Arsiparis	Rp 6.996.300	Rp 7.296.300
23.	Terampil – Asisten Statistisi	Rp 6.996.300	Rp 7.296.300
24.	Terampil – Penata Laksana Barang	Rp 6.996.300	Rp 7.296.300
25.	Terampil – Pranata Keuangan APBN	Rp 6.996.300	Rp 7.296.300
26.	Terampil - Pranata Komputer	Rp 6.996.300	Rp 7.296.300

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Penghasilan Minimal</b>	<b>Penghasilan Maksimal</b>
27.	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp 6.996.300	Rp 7.296.300
28.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	Rp 6.369.200	Rp 6.909.200
29.	Pengelola Keprotokolan	Rp 6.369.200	Rp 6.909.200

**LAMPIRAN IV**

Nomor : KP.01/01/REK-CASN/PENG/08/2024

Tanggal : 19 Agustus 2024



*\*) contoh pas foto yang diunggah saat proses rekrutmen*

**LAMPIRAN V**

Nomor : KP.01/01/REK-CASN/PENG/08/2024

Tanggal : 19 Agustus 2024

**FORMAT SURAT LAMARAN**

Jakarta, ..... 2024

Yth. Menteri Perdagangan

Di –

Jakarta

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Nomor Induk Kependudukan :  
Jenis Kelamin :  
Program Studi :  
Jabatan yang dilamar :  
Jenis kebutuhan : Umum/Disabilitas/Putra-Putri Kalimantan\*)  
Alamat :  
Nomor HP/WA :  
Alamat Email :

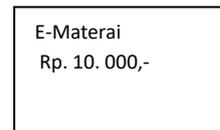
Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024. Demikian surat lamaran ini dibuat.

Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024.

Atas perhatian Bapak Menteri Perdagangan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Ttd



(Nama Lengkap)

\*) Pilih salah satu yang sesuai

## LAMPIRAN VI

Nomor : KP.01/01/REK-CASN/PENG/08/2024  
Tanggal : 19 Agustus 2024

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Nomor Induk Kependudukan :  
Agama :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., .....

Yang membuat pernyataan

Ttd

E-Materai  
Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap)